

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Mei 2018/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURACHMAT HERLAMBAH**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **486085**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.152.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KOTA JAMBI ,
WARISAN Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di BUNGO, WARISAN Rp. 437.500.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp.
200.000.000
4. Tanah Seluas 15000 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp.
937.500.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
9. Tanah Seluas 525 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp. 600.000.000
10. Tanah Seluas 4800 m2 di KOTA JAMBI , WARISAN Rp.
240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **15.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **51.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **160.008.438**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	142.500.000
Sub Total	Rp.	3.521.008.438
III. HUTANG	Rp.	83.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.437.208.438

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.